

Pendekatan Klarifikasi Nilai Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Isma Nur Rohma^{a,1*}

^aPendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang

¹ismainur17@gmail.com

Naskah diterima: 21-03-2024, direvisi: 23-03-2024, disetujui: 30-03-2024

Abstrak

Pancasila merupakan norma dasar sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sifat abstrak Pancasila menjadi problem-solving yang cepat meresap ke dalam ranah alam konsep pemikiran bangsa. Urgensi Pancasila sebagai bangunan utama penyusun Pembukaan Konstitusi, menunjukkan peraturan tidak dapat dipisahkan dengan nilai Pancasila. Perkembangan teknologi serta media sosial, tidak serta merta menampilkan sisi baik. Kurikulum PPKn sendiri adalah acuan mewujudkan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang merangsang peserta didik agar peserta didik berfikir kritis, rasional, dan kreatif. Konsep pendidikan di Indonesia sendiri selalu berubah dengan tujuan untuk mencari dan menemukan susunan terbaik seiring perubahan. Kurikulum ini menekankan pada keaktifan siswa untuk menemukan konsep pelajaran dengan guru berperan sebagai fasilitator. Nilai yang dimaksud berkaitan dengan etika sosial dan budaya, yang mana bangsa Indonesia mengedepankan sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling tolong menolong diantaranya. Bangsa ini dengan aktualisasi nilai Pancasila harus dapat menghidupkan kembali budaya malu berbuat kesalahan dan semua hal yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Kata-kata kunci: Pancasila, Kurikulum, Pengembangan

Abstract

Value Clarification Approach in Developing Pancasila and Citizenship Education Curriculum. Pancasila is the basic norm as the source of all sources of law. The abstract nature of Pancasila becomes problem-solving that quickly penetrates into the realm of the nation's concept of thought. The urgency of Pancasila as the main building for the compilers of the Preamble to the Constitution, shows that regulations cannot be separated from the values of Pancasila. The development of technology and social media, does not necessarily show the good side. The Civics curriculum itself is a reference for realizing Pancasila and civic education learning that stimulates students so that students think critically, rationally, and creatively. The concept of education in Indonesia itself is always changing with the aim of finding and finding the best arrangement as it changes. This curriculum emphasizes the activeness of students to find lesson concepts with the teacher acting as a facilitator. The values in question are related to social and cultural ethics, in which the Indonesian people prioritize honesty, care for each other, mutual understanding, mutual respect, love for each other, and mutual help among them. This nation with the actualization of Pancasila values must be able to revive the culture of shame in making mistakes and all things that are contrary to religious morals and the noble values of the nation's culture.

Keywords: Pancasila; Curriculum, Development

Pendahuluan

Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan bangsa lain. Identitas nasional bangsa Indonesia adalah Identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pengertian yang demikian ini maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dan bangsa tersebut. Namun seiring perkembangan zaman perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya berbagai perubahan dalam sendi-sendi kehidupan. Perubahan ini berupa hal positif maupun negatif.

Tak ada globalisasi tanpa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Penyebarannya berlangsung secara cepat dan meluas, tak terbatas pada negara-negara maju dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi juga melintasi batas negara-negara berkembang dan miskin.

Pertumbuhan ekonomi yang rendah. Harus diakui, aktor utama dalam proses globalisasi masa kini adalah negara-negara maju. Mereka berupaya mengeksport nilai-nilai lokal di negaranya untuk disebar ke seluruh dunia sebagai nilai-nilai global. Mereka dapat dengan mudah melakukan itu karena mereka menguasai arus teknologi informasi dan komunikasi lintas batas negara-bangsa. Sebaliknya, pada saat yang sama, negara-negara berkembang tak mampu

menyebarkan nilai-nilai lokalnya karena daya kompetitifnya yang rendah. Akibatnya, negaranegara berkembang hanya menjadi penonton bagi masuk dan berkembangnya nilai-nilai negara maju yang dianggap nilai-nilai global ke wilayah negaranya.

Penyelesaian masalah akibat pengaruh globalisasi dalam bidang pendidikan salah satunya melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). PPKn sebagai mata pelajaran formal yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari warga negara sehingga tidak dapat dipisahkan dari kecenderungan global PPKn dalam mengatasi permasalahan globalisasi harus direvitalisasi ulang agar dapat mendidik dan mencetak warga negara yang memiliki peran untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Mata pelajaran PPKn di abad 21 memerlukan perspektif baru yang bertujuan untuk pemahaman global. PPKn sebagai sudut pandang baru diharapkan dapat memberikan solusi dalam mengatasi masalah di era globalisasi.

Kurikulum

Pada kurikulum bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warganegara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kurikulum juga sebagai alat pendidikan agar memiliki kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor untuk peserta didik. Globalisasi bukanlah sesuatu yang baru, semangat

pencerahan eropa di abad pertengahan yang mendorong pencarian dunia baru dapat dikategorikan sebagai arus globalisasi. Revolusi industri dan transportasi di abad XVIII juga menjadi pendorong globalisasi, yang membedakannya dengan arus globalisasi yang terjadi pada dekade terakhir ini adalah kecepatan dan jangkauannya. Kemudian interaksi Hakikat Pancasila telah terdegradasi menjadi aspek sepele yang begitu saja dilangkahi keberadaannya. Sejatinya, Pancasila adalah bintang pemandu yang menjadi landasan filosofis, dasar negara serta refleksi jati diri bangsa Indonesia. Dalam Pancasila mengandung *rechterdie*, maupun *volgeist* sebagai bukti kedekatan historis, sosiologis, serta filosofis dengan karakter bangsa Indonesia. Pembentukan karakter bangsa sejatinya didasari oleh penjabaran nilai yang hidup dan lestari dalam bangsa tersebut. Oleh karenanya menggali kembali Pancasila sebagai langkah pembangunan karakter bangsa melalui perenungan yang sistematis dalam wujud aktualisasi nilai Pancasila. Dengan langkah aktualisasi ini diharapkan Pancasila dapat menjadi suatu *problem-solving* dalam menyelesaikan berbagai permasalahan berbangsa dan bernegara.

Secara umum, pengertian kurikulum adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar dan pengertian lainnya, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran dalam satu periode

jangka pendidikan. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa latin, yakni *curriculae* yang artinya adalah jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh peserta didik yang bertujuan untuk memperoleh ijazah.

Banyak para ahli yang merumuskan definisi dari kurikulum. Definisi menurut Beauchamp (1968), kurikulum adalah dokumen tertulis yang kandungannya berisi mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik dengan melalui berbagai mata pelajaran, pilhan disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa kurikulum sendiri memuat isi dan materi pelajaran yang dimana sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan yang akan bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran (*subject matter*) sendiri dipandang sebagai pengalaman orangtua atau orang-orang yang pandai pada masa lampau, yang telah disusun secara sistematis dan logis. Adapun Menurut Romime (1995), *curriculum is interpreted to mean all of the organized course, activities, and experiences which pupils have under direction of the school, whether in the class room or not.* Pengertian ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan kurikulum tidak terbatas dalam ruang kelas saja, melainkan mencakup kegiatan-kegiatan diluar kelas. Kurikulum dianggap sebagai program dari pendidikan untuk membelajarkan peserta didik. Dengan

program tersebut, peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar, sehingga terjadi perubahan dan perkembangan dalam tingkah laku. Kurikulum harus disusun sedemikian rupa agar menarik untuk peserta didik sehingga tercapainya tujuan kurikulum itu sendiri. Mengacu pada definisi menurut Romime dapat disimpulkan jika kurikulum tidak sebatas mata pelajaran saja tetapi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik.

Kurikulum 2013 ini dipengaruhi beberapa faktor yakni tantangan internal dan tantangan eksternal. Pertama, adanya faktor tantangan internal, antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan internal lainnya dapat dikaitkan dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 mendatang pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya manusia yang memiliki

kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.

Konsep Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia. Salah satu langkah dalam penyusunan kurikulum 2013 adalah penataan ulang PKn menjadi PPKn, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Mengubah nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
- 2) Menempatkan mata pelajaran PPKn sebagai bagian utuh dari kelompok mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan. Mengkoordinasi KI-KD dan indikator PPKn secara nasional dengan memperkuat nilai moral dan Pancasila; nilai dan norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; nilai dan

semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 3) Memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi: (1) pengetahuan Kewarganegaraan; (2) sikap Kewarganegaraan; (3) keterampilan Kewarganegaraan; (4) keteguhan Kewarganegaraan; (5) komitmen Kewarganegaraan; dan (6) kompetensi Kewarganegaraan.
- 4) Mengembangkan dan menerapkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik PPKn yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik secara utuh.
- 5) Mengembangkan menerapkan berbagai model penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn.

Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan:

- 1) Pancasila sebagai Dasar Negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
- 2) Substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang

menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warga negara Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Prinsip Pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan

Langkah Prosedur pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang terstruktur, strategis, dan representatif, yakni Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berkonsepkan deep knowledge dan constructed knowledge, menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan Berlandaskan nilai-nilai Pancasila, antara lain dengan menyusun perangkat pembelajaran yang membentuk peserta didik yang cakap kompetensinya dan menjadi lulusan yang kompeten, serta Memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter yang bersumberkan nilai dan moral Pancasila.

Penilaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Metode memiliki peranan yang penting dalam upaya mendukung tercapainya hasil belajar yang diinginkan. Secara pedagogis metode pembelajaran terbagi atas 3 (tiga) strategi (Uno, 2014) yaitu (1). Strategi Pengorganisasian: sebagai langkah untuk menentukan isi bidang studi yang dipilih untuk pembelajaran seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, dan lainnya. (2). Strategi Penyampaian: sebagai langkah untuk mendapatkan respons siswa dengan menata interaksi dengan baik. (3). Strategi Pengelolaan: langkah untuk menyiapkan strategi mengelola kelas. Dengan demikian maka hakikat metode

pembelajaran sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan hasil belajar melalui strategi-strategi belajar yang efektif, kreatif, dan relevan.

Strategi tersebut harus didukung dengan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dilihat dari segi pedagogis dan filosofinya, metode yang tepat dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus yang berorientasi pada misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi dan pembangunan nilai atau karakter agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas.

Aktualisasi nilai Pancasila sebagai problem-solving pembentukan karakter bangsa menghadapi fenomena hoax adalah nilai etika dan sosial yang hidup dalam jiwa bangsa Indonesia. Etika ini berasal dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong menolong diantara sesama manusia dan anak bangsa. Sasaran dari aktualisasi tersebut dapat ditekankan khususnya dalam tataran dunia akademisi. Sebagai pencipta pribadi yang berilmu, dunia akademik menjadi wadah yang nyata dan tepat mendukung aktualisasi nilai Pancasila.

Kesimpulan

Proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengungkap konsep transfer nilai-nilai Pancasila ke dalam struktur keilmuannya yang hendak diberikan kepada peserta didik. Oleh karenanya,

terdapat tiga ihwal penting yang perlu senantiasa diingat (Kalidjernih & Winarno, 2019). Pertama, Pancasila tidak diperlakukan sekadar sebagai pengejawantahan ideologi negara belaka. Pancasila harus dilihat sebagai filosofi bangsa yang hidup. Sila-silanya adalah cerminan pandangan hidup dan cita-cita yang dinamis dan terbuka sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, Pancasila selayaknya ditempatkan sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan dalam konteks yang lebih luas dan umum. Pancasila berintikan pendidikan moral atau pendidikan karakter. Prosedur pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dilakukan dengan terstruktur, strategis, dan representatif.

Referensi

- Adha, M. M. (2019). Advantageous of Volunteerism Values for Indonesian Community and Neighbourhoods. *International Journal of Community Service Learning*, 3(2), 83-87.
- Adha, M. (2015). Pendidikan Kewarganegaraan Mengoptimalkan Pemahaman Perbedaan Budaya Warga Masyarakat Indonesia Dalam Kajian Manifestasi Pluralisme Di Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 14(2), 1-10.
- Atmadja, I Dewa Gede. (2013). *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Press
- Aunurrahman. 2012. *Belajar dan*

- Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta
- Farida, Any. (2016). *Landasan Etis Negara Hukum Indonesia dalam Bingkai Pancasila*. dalam Absori. (2016). *Cita Hukum Pancasila, Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*. Sukoharjo: Pustaka Iltizam
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis*. Hair (7th, 2010) Pearson.
- Mulyasa. 2013. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT
- Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma.
- L. Tanya, Bernard, et. al. (2010). *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mulyadi, Yahya. *Belajar dan Pembelajaran*. Cianjur: Universitas Suryakencana.
- Nova, Firsan. (2017). *Republika.co.id. Hoax dan Pudarnya Kejantanan Berpendapat*.
- Putranto, Hendar. (2016). *Ideologi Pancasila Berbasis Multikulturalisme*. Jakarta: Mitra Wacana Media Remaja Rosdakarya.
- Safa'at, Ali. (2016). *Konsep Hukum H. L. A Hart*. Jakarta: Konstitusi Press.